

Peluang dan tantangan kolaborasi aktor negara dan aktor non-negara dalam pemberian bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Palestina (2019–2023)

Fatma Cici Alensia Lingga¹, Siti Fajrina²

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, Universitas Potensi Utama Medan

E-mail: alenlingga764@gmail.com¹, siti_fajrina@potensi-utama.ac.id²

Published: January , 2026

ABSTRACT

In Collaboration between state and non-state actors plays a crucial role in enhancing the effectiveness of international humanitarian assistance. In Indonesia's context, the government through relevant ministries and agencies works alongside various national and international non-governmental organizations to deliver aid to Palestine. This study employs a descriptive-analytical approach, focusing on the period 2019–2023, to both describe and analyze the opportunities and challenges within such collaborations. The findings reveal that these partnerships hold significant potential for accelerating aid distribution, expanding the reach of beneficiaries, and strengthening Indonesia's humanitarian diplomacy. However, several constraints limit their effectiveness, including armed conflict, regional political tensions, and fluctuating security conditions that affect access and the safety of humanitarian workers. The analysis shows that the success of these collaborations is strongly influenced by the quality of coordination, inter-organizational communication mechanisms, and the actors' capacity to conduct continuous risk management and access diplomacy. Therefore, strategic planning, active diplomacy, and integrated humanitarian governance are essential to optimizing Indonesia's role in delivering aid to Palestine.

Keywords: Humanitarian Aid, Indonesia, State–Non-State Actor Collaboration, Palestine.

Abstrak

Kolaborasi antara aktor negara dan aktor non-negara menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas bantuan kemanusiaan internasional. Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah nasional maupun internasional dalam menyalurkan bantuan ke Palestina. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan fokus pada periode 2019–2023 untuk menggambarkan sekaligus menganalisis peluang dan tantangan kolaborasi tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini memiliki potensi besar dalam mempercepat penyaluran bantuan, memperluas jangkauan penerima manfaat, serta memperkuat legitimasi diplomasi kemanusiaan Indonesia. Namun, sejumlah tantangan turut membatasi efektivitasnya, antara lain dinamika konflik bersenjata, ketegangan politik regional, serta situasi keamanan yang fluktuatif yang berpengaruh terhadap akses dan keselamatan pekerja kemanusiaan. Analisis penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, mekanisme komunikasi antarlembaga, serta kemampuan aktor untuk melakukan manajemen risiko dan diplomasi akses secara berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan strategis, diplomasi aktif, dan tata kelola kemanusiaan yang terintegrasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan peran Indonesia dalam pemberian bantuan kepada Palestina.

Kata Kunci: Bantuan Kemanusiaan, Indonesia, Kolaborasi Aktor Negara dan Non-Negara, Palestina.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Palestina merupakan wilayah yang diperebutkan sejak berabad-abad yang lalu. Namun, dalam dunia internasional awal mula terjadinya konflik Palestina – Israel diawali sejak adanya Deklarasi Balfour. Deklarasi ini lahir setelah Inggris menguasai sebagian wilayah bekas kekaisaran Ottoman yang runtuh. Deklarasi Balfour menyatakan bahwa Inggris memberikan dukungan kepada bangsa Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina atau yang mereka sebut sebagai National Home pada tanggal 2 November 1917 (Fakhrudin, 2019). Pendudukan Israel di wilayah Palestina masih

berlangsung hingga saat ini. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan dikarenakan upaya Israel dalam memperluas pemukiman masih terjadi dengan menggusur wilayah Palestina terutama di Tepi Barat (Suratiningsih, 2020). Konflik yang berkepanjangan di Palestina telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah dan kompleks. Krisis kemanusiaan ini memerlukan respons yang segera dan efektif dari komunitas internasional, termasuk Indonesia. Awal mula keterlibatan Indonesia dalam membantu Palestina dapat ditelusuri kembali ke periode awal kemerdekaan Indonesia dan perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan mereka. Sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia mengadopsi kebijakan luar negeri yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan internasional (Mahfud, 2019).

Pada tahun 1947, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu Israel dan Palestina. Namun, konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut, dan pada tahun 1967, Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Tindakan ini memicu reaksi negara-negara Arab dan dunia Islam, termasuk Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia secara konsisten dan aktif menyuarakan dukungan dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina (Crouch, 2019). Pemerintah Indonesia mengutuk pendudukan Israel dan menyerukan pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Indonesia juga menyediakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada Palestina melalui berbagai program dan proyek. Indonesia juga memainkan peran aktif di forum-forum internasional, seperti PBB dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI), untuk memperjuangkan hak-hak Palestina. Selain itu, Indonesia telah mengirim kontingen pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timur Tengah, misalnya dalam Misi Pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timur Tengah (UNTSO) dan Misi Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL). Bantuan dan dukungan Indonesia terhadap Palestina juga datang dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Berbagai organisasi non-pemerintah di Indonesia telah berkontribusi dalam membantu warga Palestina melalui bantuan kemanusiaan, pengembangan pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek pembangunan lainnya (Sari, 2020).

Dalam upaya meningkatkan efektivitas bantuan kemanusiaan, kolaborasi antara aktor negara dan aktor non-negara menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia, melalui kementerian dan lembaga terkait, telah bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) nasional maupun internasional dalam menyalurkan bantuan ke Palestina. Kolaborasi ini memungkinkan sinergi sumber daya, keahlian, dan jaringan yang dimiliki masing-masing pihak. Namun, kolaborasi semacam ini juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Perbedaan prioritas, pendekatan, dan birokrasi antara aktor negara dan non-negara dapat menghambat koordinasi dan efisiensi bantuan. Selain itu, situasi politik dan keamanan yang tidak stabil di Palestina juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan (Arjaliès, 2019). Untuk mengoptimalkan kolaborasi ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang peluang dan tantangan yang ada. Dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat proses kerja sama, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Palestina. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang bernilai bagi para pembuat kebijakan, organisasi kemanusiaan, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya memperkuat kolaborasi dan memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, organisasi kemanusiaan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kolaborasi dan dampak positif bagi rakyat Palestina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peluang dan tantangan dalam kolaborasi antara aktor negara dan aktor non-negara dalam pemberian bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Palestina. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara komprehensif sekaligus

menganalisis dinamika kerja sama yang terjadi di lapangan. Metode deskriptif-kualitatif tersebut diaplikasikan melalui tiga alur analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2011). Pada tahap reduksi data, peneliti memilah dan memilih informasi penting dari berbagai sumber terkait diplomasi Indonesia, mekanisme penyaluran bantuan, serta peran lembaga negara dan non-negara. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, temuan dirumuskan dalam bentuk uraian sistematis yang mengaitkan pola kerja sama, hambatan, serta peluang yang muncul selama proses bantuan kemanusiaan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menafsirkan makna data dan memastikan konsistensi temuan melalui perbandingan dengan sumber-sumber yang valid.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan sumber-sumber kredibel lainnya, termasuk penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah, laporan organisasi, serta informasi dari media elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Rentang waktu penelitian dibatasi pada tahun 2019–2023, karena periode ini mencerminkan fase penting intensifikasi dukungan kemanusiaan Indonesia kepada Palestina, termasuk perubahan kebijakan luar negeri, meningkatnya keterlibatan organisasi kemanusiaan, serta dinamika situasi konflik yang mempengaruhi pola penyaluran bantuan. Batasan waktu ini dipilih untuk memastikan relevansi, ketepatan, dan konsistensi analisis terhadap perkembangan terbaru dalam mekanisme kolaborasi kemanusiaan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Krisis Kemanusiaan di Palestina

Krisis kemanusiaan merujuk pada situasi ketika suatu kelompok masyarakat menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan, martabat, serta kesejahteraan mereka akibat gangguan yang bersifat drastis dan berkepanjangan. Menurut Anifa Ludfiani (2017), krisis kemanusiaan dapat muncul dari tiga kategori utama, yaitu:

- a. Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, atau badai besar yang menyebabkan kerusakan fisik dan sosial.
- b. Complex emergencies, yaitu krisis yang dipicu oleh konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, atau kekerasan sistematis.
- c. Krisis lainnya, termasuk masalah kesehatan publik, krisis industri, atau krisis finansial yang mengganggu kehidupan masyarakat.

Dalam konteks Palestina, krisis kemanusiaan secara jelas berada dalam kategori complex emergencies karena konflik berkepanjangan merupakan sumber utama dari berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi (Ludfiani, 2017). Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun telah menciptakan kondisi yang sangat kompleks, berlapis, dan sulit dipulihkan. Situasi ini tidak hanya melibatkan aspek politik dan militer, tetapi juga ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat Palestina secara keseluruhan.

Krisis tersebut diperparah oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, antara lain:

- a. Perselisihan wilayah, kontrol sumber daya, dan status Yerusalem

Sengketa berkepanjangan mengenai batas wilayah dan status Yerusalem menjadi pemicu utama konflik yang terus berlanjut. Serangan militer, operasi keamanan, dan penutupan perbatasan menyebabkan kerusakan signifikan terhadap infrastruktur publik, mulai dari rumah sakit hingga jaringan transportasi. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya nyawa, tetapi juga hilangnya mata pencaharian serta menurunnya kualitas hidup warga Palestina.

- b. Pembatasan gerakan dan blokade

Wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza mengalami pembatasan mobilitas yang sangat ketat. Blokade terhadap Gaza menyebabkan masuknya barang pokok, obat-obatan, dan kebutuhan esensial menjadi sangat terbatas. Akibatnya, masyarakat sangat bergantung pada bantuan internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, serta energi. Kondisi ini memperlemah kemampuan masyarakat untuk bertahan dan pulih dari dampak konflik.

- c. Pengungsian dan kondisi kamp pengungsi

Konflik berkepanjangan telah menyebabkan jutaan warga Palestina hidup sebagai pengungsi, baik di dalam Palestina maupun di negara-negara tetangga. Banyak keluarga harus tinggal di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi yang jauh dari layak, ditandai dengan keterbatasan akses terhadap

pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan peluang pekerjaan. Situasi ini menciptakan kerentanan jangka panjang bagi generasi muda Palestina.

d. Ketegangan sosial-ekonomi yang semakin buruk

Konflik dan ketidakpastian politik membuat ekonomi Palestina tidak stabil. Tingkat pengangguran yang sangat tinggi, kemiskinan yang meluas, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan sumber daya ekonomi memperparah krisis kemanusiaan. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki ketahanan ekonomi yang cukup untuk menghadapi guncangan akibat konflik.

e. Keterlibatan aktor eksternal

Intervensi pihak eksternal baik negara-negara regional, Israel, maupun kekuatan global ikut memengaruhi dinamika konflik. Dukungan politik, militer, dan finansial dari aktor luar sering kali memperpanjang ketegangan serta mempersulit upaya mediasi dan perdamaian. Kompleksitas geopolitik inilah yang membuat krisis kemanusiaan Palestina sulit diselesaikan secara tuntas.

Secara keseluruhan, krisis kemanusiaan di Palestina merupakan hasil dari tumpang tindih faktor politik, militer, sosial, dan ekonomi yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Pemulihan dan penyelesaian krisis tidak dapat dilakukan semata-mata melalui bantuan kemanusiaan, tetapi membutuhkan upaya diplomasi internasional, dialog konstruktif antara pihak-pihak yang terlibat, serta komitmen kolektif untuk menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan (Sumba, 2023).

2. Kebijakan Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan bantuan kemanusiaan untuk membantu Palestina dalam periode 2019-2024. Tujuan dari bantuan kemanusiaan Indonesia adalah untuk membantu masyarakat Palestina yang terdampak oleh konflik dan bencana, serta untuk menunjukkan komitmen dan solidaritas Indonesia terhadap Palestina (Karso, 2024). Pada tahap pertama, bantuan yang dikirimkan berupa obat-obatan, hygiene kit, makanan bergizi, serta bantuan logistik lainnya yang dibutuhkan masyarakat Gaza, Palestina. Bantuan ini dikirimkan secara langsung oleh Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada 4 November 2023, menggunakan 2 pesawat TNI AU seberat 21 ton dan 30 ton dikirim pada 5 November 2023 diberangkatkan dengan pesawat kargo melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bantuan tahap pertama tersebut antara lain adalah penjernih air minum, alat-alat medis, obat-obatan, dan bahan-bahan makanan (Biro Pers, 2023).

Pada tahap kedua, bantuan yang dikirimkan berupa perlengkapan rumah sakit dan obat-obatan senilai Rp 31,9 miliar. Pelepasan bantuan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan ini tidak hanya bersumber dari pemerintah, namun juga dari dunia usaha dan masyarakat yang disalurkan melalui PT Paragon Technology dan Inovasi, Indonesian Humanitarian Alliance, Kita Bisa, Badan Amil Zakat Nasional, WeCare, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan tahap kedua pada 20 November 2023, untuk masyarakat Palestina di Yordania. Bantuan ini dikirimkan untuk membantu pengungsi Palestina di Yordania, yang terdampak oleh konflik dan bencana (Rokom, 2023). Dengan demikian, kebijakan bantuan kemanusiaan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu Palestina dalam periode 2019-2024 adalah sebagai upaya untuk membantu masyarakat Palestina yang terdampak oleh konflik dan bencana, serta untuk menunjukkan komitmen dan solidaritas Indonesia terhadap Palestina.

3. Kolaborasi Aktor Negara Dan Non- Negara Dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Dari Indonesia Ke Palestina

Kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam pemberian bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Palestina mencerminkan upaya bersama untuk menghadirkan bantuan yang lebih efektif dan komprehensif bagi masyarakat Palestina yang terdampak krisis. Dalam konteks ini, aktor negara merujuk pada pemerintah Indonesia beserta kementerian dan lembaga publik terkait, sedangkan aktor non-negara mencakup organisasi non-pemerintah (NGO), yayasan, dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam implementasi program kemanusiaan. Kolaborasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika hubungan domestik antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti perubahan konstelasi politik internasional,

kebijakan luar negeri Indonesia yang terus beradaptasi terhadap isu Palestina, serta pengaruh media global yang membentuk opini publik dan tingkat urgensi bantuan. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat memperkuat ataupun menghambat sinergi kedua aktor, tergantung bagaimana mereka merespons perkembangan global dan menyesuaikan strategi kolaborasi di lapangan. Berikut adalah beberapa contoh nyata kolaborasi tersebut:

a. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan LSM lokal dan internasional untuk mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya guna menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan kebutuhan sehari-hari lainnya bagi warga Palestina yang terdampak konflik. Salah satu contoh LSM lokal yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada Palestina adalah "ACT (Aksi Cepat Tanggap)". Melalui program-programnya, ACT telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat Palestina yang membutuhkan. Contoh program bantuan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh ACT di Palestina, ACT telah melakukan distribusi makanan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan di Palestina. Mereka menyediakan paket makanan yang berisi bahan makanan pokok dan kebutuhan harian lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. ACT juga telah menyediakan akses ke air bersih bagi masyarakat Palestina. Mereka memasang instalasi air bersih, seperti sumur bor dan mesin penyulingan air, untuk memastikan pasokan air yang aman dan layak konsumsi. ACT memberikan bantuan medis kepada masyarakat Palestina yang membutuhkan. Mereka menyediakan peralatan medis, obat-obatan, dan dukungan medis lainnya untuk membantu mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi oleh penduduk Palestina. ACT juga berfokus pada program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan di kamp-kamp pengungsi Palestina. Mereka memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan dukungan pendidikan kepada masyarakat Palestina untuk membantu meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi mereka (Gusman, 2019).

Salah satu LSM internasional yang aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada Palestina adalah "Islamic Relief Worldwide" (IRW). IRW adalah organisasi kemanusiaan internasional yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, krisis kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia, termasuk di Palestina. IRW telah terlibat dalam berbagai program bantuan kemanusiaan di wilayah Palestina yang terdampak konflik, termasuk penyediaan makanan, air bersih, perawatan medis, pendidikan, dan bantuan rekonstruksi. Organisasi ini bekerja sama dengan berbagai mitra lokal dan internasional, termasuk pemerintah Indonesia, untuk menyediakan bantuan yang diperlukan kepada warga Palestina. Selain itu, IRW juga terlibat dalam proyek-proyek jangka panjang yang bertujuan untuk membantu komunitas Palestina membangun kemandirian ekonomi mereka sendiri, seperti program-program pelatihan keterampilan, bantuan untuk usaha kecil, dan pembangunan infrastruktur. Dukungan IRW untuk Palestina tercermin dalam komitmennya untuk membantu komunitas yang menderita dampak konflik, serta dalam keyakinannya bahwa semua manusia memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan keadilan (Mausyach, 2023).

b. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan organisasi kemanusiaan internasional: Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai organisasi kemanusiaan internasional seperti Palang Merah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. PMI telah mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina senilai Rp2,9 Miliar. Jenis barang yang dikirim berupa oxygen concentrator, tabung oksigen, masker N95, masker respirator, sarung tangan lateks, apron, baby kit, kantong mayat infeksius, alat penjernih air, alat ini digunakan untuk membersihkan air dari kontaminan dan membuatnya aman untuk dikonsumsi. Kapasitas produksi air minum yang disebutkan yaitu sebanyak 1.500 – 2 liter/ jam, menunjukkan bahwa bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Palestina yang terdampak. Selanjutnya ada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina Pengungsi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees – UNRWA) adalah sebuah lembaga PBB yang didirikan pada tahun 1949. Tujuan utamanya adalah memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan pelayanan dasar kepada jutaan pengungsi Palestina di wilayah pendudukan, seperti Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon. UNRWA menyediakan layanan kesehatan dasar kepada pengungsi Palestina

melalui jaringan pusat kesehatan dan klinik yang tersebar di wilayah-wilayah yang terdampak. Mereka menyediakan perawatan medis, vaksinasi, pengobatan penyakit menular, perawatan maternal dan anak, dan layanan kesehatan mental. UNRWA juga berperan dalam mengatasi wabah penyakit dan memberikan dukungan gizi kepada anak-anak. UNRWA menyediakan layanan sosial dan perlindungan bagi pengungsi Palestina. Mereka memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan, termasuk tunjangan pangan dan bantuan tunai. UNRWA juga terlibat dalam program-program perlindungan anak, perempuan, dan keluarga yang rentan. Selain memberikan bantuan darurat, UNRWA juga berperan dalam upaya pemulihan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang terdampak. Mereka mendukung program-program ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelatihan kerja, dan pengembangan kapasitas masyarakat (Arbar, 2024).

c. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dengan dunia usaha:

Dunia usaha telah berkontribusi dalam bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina dengan berbagai cara, mengirimkan bantuan kebutuhan dasar, seperti obat-obatan, perlengkapan rumah sakit dan bahan makanan, mengirimkan bantuan kebutuhan dasar, seperti popok bayi, pembalut, jilbab, susu bubuk, dan lain-lain, mengirimkan bantuan logistik lainnya yang dibutuhkan masyarakat Gaza, Palestina. Mengirimkan bantuan kebutuhan dasar, seperti perlengkapan rumah sakit dan obat-obatan senilai Rp 31,9 milyar, mengirimkan bantuan kebutuhan dasar, seperti penjernih air minum, alat-alat medis, obat-obatan, dan bahan-bahan makanan serta mengirimkan bantuan kebutuhan dasar, seperti oxygen concentrator, tabung oksigen, masker N95, masker respirator, dan lain-lain. Dunia usaha telah berkontribusi dalam bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina dengan berbagai jenis bantuan, termasuk bantuan kebutuhan dasar, logistik lainnya, dan lain-lain. Bantuan-bantuan tersebut dikirimkan oleh berbagai organisasi, termasuk Dompot Dhuafa, PT Paragon Technology dan Inovasi, Indonesian Humanitarian Alliance, Kita Bisa, Badan Amil Zakat Nasional, WeCare, dan lain-lain. Bantuan-bantuan tersebut dikirimkan melalui berbagai jalur, termasuk menggunakan pesawat TNI AU, kapal rumah sakit TNI AL (Kemlu, 2023).

d. Kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan organisasi relawan:

Organisasi relawan biasanya bertanggung jawab untuk menggalang dana dari masyarakat, baik melalui kampanye penggalangan dana, acara pengumpulan sumbangan, atau melalui donasi online. Pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam hal promosi acara penggalangan dana, memberikan izin untuk kegiatan tersebut, atau bahkan menyediakan dana tambahan sebagai bentuk dukungan. Selain penggalangan dana, organisasi relawan juga biasanya mengumpulkan barang-barang kebutuhan seperti pakaian, makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, dan barang-barang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pemerintah daerah dapat membantu dalam menyediakan tempat pengumpulan barang, fasilitas logistik, atau izin untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Organisasi relawan menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI sebesar Rp50 juta, sebagai wujud kepedulian terhadap rakyat di Palestina (BAZNAS, 2023).

4. Peluang Dan Tantangan Yang Dihadapi Aktor Negara Dan Non-Negara Dalam pemberian Bantuan Kemanusiaan

Kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina pada periode 2019-2023 menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, meningkatnya solidaritas publik Indonesia dan besarnya perhatian media global menciptakan dukungan moral serta finansial yang memperkuat kapasitas pemerintah dan NGO untuk bergerak. Posisi diplomatik Indonesia yang konsisten mendukung Palestina juga menjadi peluang bagi terbukanya kerja sama internasional dan mempermudah koordinasi bantuan. Keberadaan berbagai NGO yang telah lama bekerja di wilayah konflik turut membantu memperlancar implementasi program kemanusiaan melalui jaringan operasional yang lebih fleksibel. Namun, tantangan tetap signifikan. Situasi keamanan Palestina yang tidak stabil, pembatasan akses, serta risiko eskalasi kekerasan sering menghambat distribusi bantuan dan membatasi ruang gerak organisasi kemanusiaan. Selain itu, ritme kerja yang berbeda antara pemerintah dan NGO birokratis di satu sisi dan cepat di sisi lain menuntut koordinasi yang lebih efektif agar tidak menimbulkan ketidaksinkronan. Dinamika politik internasional dan perubahan kebijakan nasional juga

memengaruhi ruang gerak kedua aktor, sementara tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa peluang dan tantangan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh situasi di Palestina, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti perubahan politik global dan pengaruh media internasional yang membentuk persepsi publik dan arah kebijakan.

a. Peluang

1. Hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Palestina: Indonesia telah lama menjadi pendukung utama kemerdekaan Palestina dan banyak melakukan upaya diplomasi untuk mendukung perjuangan Palestina. Hal ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif di Palestina (Amnesty Internasional, 2022). Melalui hubungan diplomatik yang baik, Indonesia dan Palestina dapat memiliki saluran komunikasi yang terbuka. Ini memungkinkan keduanya untuk secara aktif berdiskusi mengenai kebutuhan kemanusiaan di Palestina dan mempertimbangkan cara terbaik untuk memberikan bantuan. Melalui hubungan diplomatik yang baik, Indonesia dapat memperoleh akses yang lebih mudah ke wilayah Palestina untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan. Kerjasama antara kedua negara dalam hal izin, logistik, dan koordinasi dapat membantu memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat mencapai mereka yang membutuhkan dengan lebih efektif.

2. Dukungan publik di Indonesia: Terdapat simpati dan dukungan kuat dari masyarakat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ini bisa menjadi modal bagi pemerintah dan aktor non-negara untuk melakukan penggalangan dana. Dukungan publik yang tinggi menciptakan potensi besar untuk penggalangan dana yang efektif. Masyarakat Indonesia, termasuk individu, kelompok masyarakat, dan perusahaan swasta, seringkali bersedia menyumbangkan dana untuk membantu rakyat Palestina. Dukungan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan organisasi kemanusiaan untuk mengumpulkan dana yang signifikan untuk bantuan kemanusiaan di Palestina. Dukungan publik yang kuat dari Indonesia dapat membantu meningkatkan kesadaran global terhadap situasi di Palestina. Melalui media sosial, kampanye, dan acara kesadaran, pesan tentang penderitaan rakyat Palestina dapat tersebar luas, menyebabkan lebih banyak orang di seluruh dunia sadar akan tantangan yang mereka hadapi.

3. Keberadaan organisasi masyarakat sipil yang aktif: Banyak organisasi non-pemerintah di Indonesia yang berfokus pada isu Palestina dan telah berpengalaman memberikan bantuan kemanusiaan. Mereka bisa bermitra dengan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara efektif. Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk memahami kebutuhan kemanusiaan yang ada di Palestina. Melalui dialog terbuka, pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam memberikan bantuan. Organisasi masyarakat sipil memiliki jaringan luas di masyarakat dan dapat membantu dalam menggalang dana dari berbagai sumber, termasuk masyarakat umum, perusahaan swasta, dan lembaga donor. Kolaborasi dengan pemerintah dalam penggalangan dana dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program bantuan.

b. Tantangan

1. Kendala politik dan keamanan: Situasi politik dan keamanan yang tidak stabil di Palestina, khususnya di Tepi Barat dan Gaza, dapat menjadi tantangan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan secara aman dan efektif. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina serta di antara kelompok-kelompok Palestina sendiri sering terjadi di wilayah tersebut. Tindakan kekerasan seperti penembakan, serangan udara, dan pertempuran dapat mengancam keselamatan para pekerja kemanusiaan dan mengganggu distribusi bantuan kemanusiaan. Teroris atau kelompok bersenjata lainnya yang beroperasi di wilayah Palestina dapat mengancam keselamatan para pekerja kemanusiaan dan menyebabkan ketidakstabilan keamanan yang dapat mengganggu operasi bantuan.

2. Akses terbatas ke wilayah pendudukan: Israel seringkali membatasi akses ke wilayah Palestina, terutama Gaza, yang dapat menghambat upaya penyaluran bantuan. Israel telah memberlakukan blokade laut, udara, dan darat terhadap Jalur Gaza sejak 2007 sebagai tanggapan terhadap pengambilalihan Gaza oleh Hamas. Blokade ini mengakibatkan pembatasan ekstrem terhadap impor dan ekspor barang-barang, termasuk barang-barang kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Sebagai hasilnya, akses ke bantuan kemanusiaan sangat terbatas. Israel mengontrol

semua perbatasan Gaza, termasuk perbatasan dengan Israel dan Mesir. Pemeriksaan ketat di perbatasan ini menyulitkan masuknya barang-barang bantuan kemanusiaan ke Gaza. Proses pemeriksaan yang panjang dan kadang-kadang sewenang-wenang sering mengakibatkan bantuan yang mendesak tertunda atau bahkan dicegah masuk. Selain blokade darat, Israel juga membatasi akses udara dan laut ke Gaza. Ini membuat sulitnya impor bantuan kemanusiaan dan ekspor produk-produk Palestina, serta menghambat akses para pekerja kemanusiaan dan ahli medis ke wilayah tersebut.

3. Koordinasi yang kompleks: Terdapat banyak aktor, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Palestina. Koordinasi yang efektif di antara mereka menjadi tantangan tersendiri. Terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Palestina, termasuk pemerintah nasional dan daerah, organisasi internasional, lembaga donor, NGO lokal dan internasional, serta badan-badan bantuan lainnya. Kehadiran beragamnya aktor ini menciptakan tantangan dalam menyatukan tujuan, strategi, dan tindakan mereka: Setiap aktor yang terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan mungkin memiliki pendekatan, prioritas, dan kepentingan yang berbeda. Beberapa mungkin fokus pada penyediaan bantuan medis, sementara yang lain mungkin lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan ekonomi. Memadukan berbagai pendekatan dan prioritas ini dapat menjadi tantangan.

4. Keterbatasan sumber daya: Baik pemerintah Indonesia maupun organisasi non-pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun logistik, untuk menyalurkan bantuan secara memadai. Pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah seringkali harus bergantung pada anggaran yang terbatas untuk mendanai program-program kemanusiaan mereka. Keterbatasan keuangan ini dapat membatasi jumlah bantuan yang dapat disalurkan, serta jenis program yang dapat dilaksanakan. Dalam situasi di mana anggaran pemerintah terbatas, prioritas diberikan kepada program-program yang dianggap lebih penting atau mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dapat mengakibatkan alokasi dana yang kurang untuk program-program kemanusiaan, mengurangi kapasitas pemerintah untuk memberikan bantuan secara memadai. Distribusi bantuan kemanusiaan seringkali melibatkan biaya logistik yang tinggi, terutama di wilayah yang terpengaruh konflik atau memiliki akses terbatas. Biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi dapat menguras anggaran yang tersedia, terutama bagi organisasi non-pemerintah yang bergantung pada sumbangan dan dana sukarela.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kolaborasi antara aktor negara dan non-negara dalam pemberian bantuan kemanusiaan dari Indonesia ke Palestina memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif bantuan, namun juga harus dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti konflik bersenjata, ketegangan politik, dan situasi keamanan yang tidak stabil di wilayah konflik dapat mengancam keselamatan para pekerja kemanusiaan dan menghambat distribusi bantuan. Pembatasan akses oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait dapat menyulitkan pengiriman bantuan ke wilayah yang membutuhkan, terutama dalam situasi blokade atau pendudukan. Keterbatasan dana, personil, dan infrastruktur logistik seringkali menjadi hambatan dalam menyediakan bantuan kemanusiaan secara memadai. Koordinasi yang efektif antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi non-pemerintah, seringkali sulit karena perbedaan pendekatan, prioritas, dan kepentingan. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi aktor negara dan non-negara dalam pemberian bantuan kemanusiaan ke Palestina tahun 2019-2023 ada beberapa cara yang digunakan seperti Melalui diplomasi aktif dan negosiasi, aktor-aktor terkait dapat bekerja sama untuk mengurangi ketegangan politik, meningkatkan keamanan, dan membuka akses bagi penyampaian bantuan kemanusiaan. Diperlukan perencanaan yang cermat dan pengelolaan risiko yang efektif untuk mengatasi tantangan keamanan dan logistik yang mungkin timbul selama penyampaian bantuan. Ini termasuk pemantauan situasi yang terus-menerus dan pengembangan rencana darurat yang dapat diimplementasikan dengan cepat. Dengan mengimplementasikan pendekatan ini secara bersama-sama, aktor-aktor yang terlibat dapat mengatasi tantangan yang

dihadapi dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan memastikan bahwa bantuan tersebut mencapai mereka yang membutuhkan dengan cepat, efisien, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- AmnestyInternasional. (2022). Occupied Palestina Territories and Israel Report.
- Anifa Ludfiani, A. E. (2017). Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya. E - SOSPOL, 82 -88.
- Arbar, T. F. (2024, Januari). Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240129094744-4-509738/ramai-negara-setop-pendanaan-untuk-badan-pbb-palestina-ini-faktanya>
- Arjaliès, D. L. (2019). The Challenges of Collaboration in Humanitarian Supply Chains. *Journal of Operations Management*.
- BAZNAS. (2023, November 11). Retrieved from Humas BAZNAS RI: https://baznas.go.id/news-show/Peduli_Palestina_Relawan_Nusantara_Salurkan_Bantuan_Kemanusiaan_melalui_BAZNAS_RI/1817
- Biro Pers, M. d. (2023, November Sabtu). Retrieved from <https://www.presidenri.go.id/?s=>
- Crouch, M. (2019). Indonesia and the Israeli-Palestinian Conflict: A Historical Overview. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- Dewi Suratiningsih. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI DALAM DIPLOMASI KEMANUSIAAN: Best Practice ACT dalam Isu .. Scopindo Media Pustaka.
- Dewi Suratiningsih1*, D. P. (2020). DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN NGO KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA TAHUN 2014-2020. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11-28.
- Dewi Suratiningsih, D. P. (2020). DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN NGO KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA TAHUN 2014 - 2020.
- Emilia Palupi Nurjannah, M. F. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* , Vol. 1 No.1 .
- Fakhruddin, E. P. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, vol 1 15- 26.
- Gusman, M. F. (2019). Peran Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam Pelaksanaan Diplomasi. *repository.umy*.
- Karso, A. J. (2024). Perang Israel dan Palestina, peran serta indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan palestina. *EUREKA MEDIA AKSARA*, JANUARI 2024.
- Kemlu. (2023, November 20). Retrieved from Kemlu.go: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5527/berita/pemerintah-indonesia-fasilitasi-bantuan-kemanusiaan-tahap-kedua-untuk-palestina>
- Mahfud, M. D. (2019). The Role of Indonesia in the Palestinian Struggle: An Analysis of Indonesian Foreign Policy towards Palestine. *Journal of International Studies*, 15(1), 59-75.
- Mausyach, S. N. (2023). Peran Islamic Relief Worldwide dalam Memenuhi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Palestina. *Repository Unsri*.
- Rokom. (2023, November). Retrieved from <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20231120/4744284/indonesia-kirim-bantuan-kemanusiaan-tahap-dua-untuk-palestina-sebesar-rp-319-milyar/>
- Sari, D. R. (2020). The Role of Indonesia in Mediating the Israeli-Palestinian Conflict: An Analysis of its Motivation and Strategy. *Journal of ASEAN Studies*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung : Alfabeta.
- Sumba, H. U. (2023). *Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian*. website.
- Suratiningsih, D. P. (2020). DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN NGO KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA TAHUN 2014 -2020